AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam
https://journal.stiba.ac.id/index.php/fikrah/index
Vol. 3, No. 6 (2026)
p.1104-1128
doi: 10.36701/fikrah.v3i6.3890

Status Rukhsah bagi Musafir dalam Safar Maksiat (Studi Komparatif Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki)

The Legal Status of Rukhsah for t he Traveler in a Journey of Disobediance : A Comparatif Study of the Hanafi and Maliki Schools of Thought

Mukran H. Usman
Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: mukran@stiba.ac.id

Nirwana
Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: nirwana18072003@gmail.com

Ridwan
Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: ridwanibnhambali@stiba.ac.id

Article Info
Received : 03 06 2026
Revised : 11 06 2026
Accepted : 15 11 2026
Published : 19 11 2026

Keywords: *Rukhsah, Traveler, Traveling, Mazhab, Hanafi, Maliki, sinful*

Kata kunci: Rukhsah, Musafir, Safar, Mazhab, Hanafi, Maliki, Maksiat

Copyright: Mukran H. Usman, Nirwana, Ridwan.

Abstract

One of the distinctive features of Islamic teachings is the provision of rukhsah (legal concessions) for travelers in performing acts of worship in order to alleviate hardship. However, when the application of these concessions is broadly extended, particularly to cases of travel undertaken for sinful purposes (safar ma'ṣiyah), differing opinions emerge regarding whether such concessions are permissible. This study aims to examine the legal status of rukhsah for travelers undertaking sinful journeys through a comparative analysis of the views of the Hanafi and Maliki schools of Islamic jurisprudence. The research questions addressed in this study are as follows: First, what are the views of the Hanafi and Maliki schools regarding the legal status of rukhsah for travelers undertaking sinful journeys? Second, what are the similarities and differences between the Hanafi and Maliki schools concerning the legal status of such concessions? This study employs a qualitative research approach using library research methods. The approaches adopted are normative and comparative. The findings of this study are as follows. First, the Hanafi and Maliki schools differ in their views regarding the granting of rukhsah for sinful journeys. The Hanafi school permits travelers undertaking journeys for sinful purposes to benefit from such concessions, whereas the Maliki school does not permit them to do so. Second, the similarity between the two schools lies in their recognition that travel has specific time and distance limits, as well as legal provisions that must be respected and observed. The difference, however, lies in their respective legal reasoning: the Hanafi school places greater emphasis on general textual evidence supporting the permissibility of such concessions, while the Maliki school applies specific principles of Islamic jurisprudence (qawā'id fiqhiyyah) to establish their prohibition. The implications of this study are expected to serve as a reference for future researchers conducting similar studies, particularly those addressing the jurisprudence of travel (fiqh al-safar)

and comparative Islamic jurisprudence (fiqh muqāran). Furthermore, this study is expected to benefit readers and broaden their understanding of Islamic knowledge.

Abstrak

Salah satu keitimewaan dari ajaran Islam adalah pemberian rukhsah bagi musafir dalam melakukan ibadah untuk menghilangkan kesulitan, tetapi ketika rukhsah tersebut dibuka lebar dalam realisasinya, seperti rukhsah dalam safar maksiat, maka hal tersebut memberikan beragam pendapat tentang kebolehan atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang status rukhsah bagi musafir dalam safar maksiat, studi komparatif pandangan mazhab Hanafi dan Maliki. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, *pertama,* bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki terhadap status rukhsah bagi musafir dalam safar maksiat. *Kedua,* Bagaimana persamaan dan perbedaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki terhadap status rukhsah bagi musafir dalam safar maksiat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif dan komparatif. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *Pertama,* mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berbeda pendapat dalam pemberian rukhsah dalam safar maksiat, mazhab Hanafi membolehkan bagi musafir dengan tujuan maksiat mendapatkan rukhsah, sementara mazhab Maliki tidak membolehkan. *Kedua*, persamaan dari kedua mazhab adalah bahwa kedua mazhab memandang bahwa safar memiliki batas waktu dan batas jarak dan memiliki hukum yang harus di hormati dan ditaati, adapun perbedaannya adalah bahwa mazhab Hanafi lebih melihat pada keumuman dalil tentang pembolehannya sementara mazhab Maliki melihat dari sisi kekhususan dalil dalam pelarangannya. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama, khususnya yang membahas persoalan fikih safar ataupun fikih *muqāran*. Juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah wawasan keislaman.

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: **Mukran H. Usman, Nirwana, Ridwan**. "Status Rukhsah bagi Musafir dalam Safar Maksiat (Studi Komparatif Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 6 (2026): 1104-1128. https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i6.3890

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama paling sempurna yang diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai petunjuk yang dapat membimbing manusia menuju jalan kebenaran. Kesempurnaan ajaran Islam tersebut tercermin dalam berbagai dalil yang termuat dalam Al-Qur'an. Salah satu diantaranya adalah firman Allah Swt. pada Q.S. Al-Māidah /5: 3.

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.[1]

Imam al-Ṭabarī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kesempurnaan agama" dalam ayat tersebut adalah penyempurnaan seluruh kewajiban, batasan-batasan hukum, perintah dan larangan, serta halal dan haram, yang telah Allah Swt. turunkan melalui wahyu kepada Rasulullah saw. bagi umat Islam. Dengan demikian, setelah turunnya ayat ini, tidak ada lagi tambahan setelah hari itu.[2]

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia. Islam hadir sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Rab-Nya, serta hubungan sosial antarmanusia. Oleh karena itu, ajaran Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah, akidah dan akhlak.

Nabi saw. diutus oleh Allah Swt. bukan untuk mempersulit dan memberatkan kehidupan umat manusia. Beliau membawa ajaran yang sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan manusia, dilengkapi dengan berbagai kemudahan dan keringanan. Al-Qur'an menekankan, bahwa Allah Swt. tidak membebankan manusia melebihi batas kesanggupan yang dimiliki. Dengan demikian, segala jenis perintah yang ditetapkan oleh Allah Swt. yang wajib dilaksanakan, tidak akan melebihi batas kemampuan seseorang dalam menjalankannya. Bahkan, hukum yang bersifat wajib dapat gugur apabila seorang mukallaf tidak mampu untuk menjalankannya. Terdapat banyak dalil dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. yang menjelaskan bahwa Islam memberikan berbagai kemudahan kepada umat manusia, yang semua itu menjadi bukti bahwa Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia.[3] Salah satu ayat yang menjelaskannya yaitu firman Allah Swt. pada Q.S. Al-Baqarah/2: 286

لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.[4]

Juga disebutkan dalam hadis Nabi saw:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يَشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ. (رَوَاهُ البُخَارِي)[5]

Artinya:

Sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seseorang berlebih-lebihan (menyusahkan diri) dalam urusan agama melainkan agama akan mengalahkannya.

Dalam Islam, keringanan yang diberikan kepada seseorang di sebut dengan istilah rukhsah. Rukhsah merupakan bentuk keringanan yang ditentukan dalam hukum Islam

[1]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 145.

[2]Abu Ja'far Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli Āyi Al-Qur'ān* (Cet. 1; Mersir: Dār Hajr Li al-Tabāati Wa al-Nasyri Wa al-Tauzīi Wa al-I'lan, 1442 H/2021 M), h. 80.

[3]Adryan Zulfikar, "Konsep Rukhsah Menurut Mazhab Syafii" *skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2017), h. 2.

[4]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 64.

[5]Abu 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al- Bukhārī al-Ju'fi, *Ṣahīḥ al-Bukhārī* (Cet. V; Damaskus: Dār Yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 23.

yang diberikan kepada mukallaf karena adanya kondisi atau alasan tertentu, tetapi hukum asal yang menjadi dasar ketentuan tersebut tetap berlaku.[6]

Berdasarkan prinsip kemudahan dalam syariat, kondisi safar termasuk diantara sebab yang menjadi dasar diberikannya rukhsah dalam pelaksanaan kewajiban agama seperti salat dan puasa. Dalam hal ini, syariat menggugurkan sebagian kewajiban, meringankan sebagian yang lain, dan menunda pelaksanaannya bagi yang berhalangan. Sebagai contoh, syariat tidak mewajibkan salat jumat bagi musafir, memberikan ketentuan salat qasar bagi musafir, memperbolehkan salat dalam posisi duduk maupun berbaring jika seorang tidak sanggup untuk berdiri, serta keringanan bagi orang sakit dan musafir untuk tidak berpuasa dan menggantinya pada hari lain.[7] Diantara dalil yang menjelaskannya, firman Allah Swt. pada Q.S. Al-Baqarah/2: 18.

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

> Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.[8]

Dalam praktiknya, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan safar. Tidak jarang didapati banyak orang yang melakukan safar dengan tujuan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti orang yang melakukan perjalanan menuju pada tempat atau sesuatu yang haram.[9] Pada persoalan ini, muncul suatu pertanyaan, apakah orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan kemaksiatan tetap berhak untuk mendapatkan rukhsah sebagaimana orang yang melakukan perjalanan untuk ketaatan atau hal yang mubah? Dalam permasalahan ini, terdapat perbedaan pandangan dari beberapa mazhab. Sebagian dari pandangan mazhab menyatakan bahwa seorang yang melakukan perjalanan dengan tujuan kemaksiatan atau safar maksiat, tidak berhak untuk mendapatkan rukhsah. Sebaliknya, sebagian mazhab berpendapat bahwa rukhsah tersebut tetap berlaku bagi siapa saja yang telah memenuhi syarat sebagai seorang musafir. Dengan demikian, peneliti ingin membahas lebih lanjut topik perbedaan pendapat mazhab yang terkait dengan masalah tersebut, dengan mengusung judul penelitian: *Status Rukhsah bagi Musafir dalam Safar Maksiat (Studi Komparatif Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki).* Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama;* bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki terhadap status rukhsah bagi musafir dalam safar maksiat. *Kedua* bagaimana persamaan dan perbedaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki terhadap status rukhsah bagi musafir dalam safar maksiat. Adapun tujuan penelitian ini adalah *Pertama;* untuk mengetahui pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maiki terhadap status rukhsah bagi musafir dalam safar maksiat dan *Kedua;* untuk mengetahui persamaan dan

[6]Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muhammad al-Gazālī, *Al-Musṭaṣfā* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413H/1993 M), h. 78.

[7]Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad Ālī Burnū, *Al-Wajīz Fī Iḍāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah* (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risālah al-'Alāmiyyah, 1416 H/1996 M), h. 224.

[8]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 37.

[9]Nanda Afriani, "Hukum Mengqasar Salat dalam Safar Maksiat" *skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2021), h. 6.

perbedaan antara mazhab hanafi dan mazhab Maliki terhadap status rukhsah bagi musafir dalam safar maksiat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau metode kepustakaan *(Library Research).* Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Normatif dan komparatif.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relefansi, namun belum mengkaji seperti yang peneliti temukan dalam penelitian ini. Diantara penelitian tersebut adalah, *Pertama;* artikel dengan judul *Hukum dan Rukhsah Puasa dalam Perspektif Fakhrudin al-Razi dan Musthafa al-Maraghi: Studi Interpretasi dengan Pendekatan Tafsir Ahkam*[10] karya Abd. Muqit . Jurnal tersebut membahas tujuan, kewajiban, serta rukhsah puasa Ramadhan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an menurut pandangan Fakhrudin al-Razi dan Musthafa al-Maraghi. Sementara penelitian ini berfokus pada status rukhsah bagi musafir dalam safar maksiat menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki**.** *Kedua*; Skripsi dengan judul *Hukum Mengqasar Salat dalam Safar Maksiat*[11] karya Nanda Afriani. Peneliti menyimpulkan bahwa seorang yang melakukan safar dengan tujuan bermaksiat lalu kemudian mengqasar salat, merupakan suatu yang tidak dibenarkan dan tidak disyariatkan oleh agama Islam. Pada penelitian ini, terdapat kesamaan pembahasan yaitu pada konsep safar maksiat. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu mengkaji secara khusus bagaimana hukum qasar salat pada safar maksiat dalam pandangan hukum Islam. Sementara penelitian ini membahas lebih luas lagi berbagai bentuk rukhsah dalam safar dan tidak mengkhususkan pada qasar salat saja, dan juga berfokus pada komparatif pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.

Ketiga; Skripsi dengan judul *Konsep Safar dan Rukhsah dalam Perjalanan Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Azhar*[12] karya Muhammad Alfi. Peneiti menyimpulkan bahwa menurut Ibnu Katsir, seorang musafir pada bulan ramadan mendapatkan keringanaan untuk berbuka dan mengqadanya pada waktu lain karena hal ini dikhawatirkan dapat menyulitkan musafir. Adapun menurut pandangan Buya Hamka, musafir dan orang yang sakit boleh untuk tidak berpuasa dan wajib menggantinya di waktu lain. Apabila ia tidak sanggup menggantinya, maka boleh dengan membayar fidyah. Kedua penelitian ini membahas tentang rukhsah dalam safar. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas konsep rukhsah dalam safar dalam penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka. Adapun penelitian ini membahas status rukhsah bagi musafir dalam safar maksiat menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Rukhsah, Safar dan Maksiat

[10]Abd. Muqit, "Hukum dan Rukhsah Puasa dalam Perspektif Fakhrudin Al-Razi dan Musthafa al-Maraghi: Studi Interpretasi dengan Pendekatan Tafsir Ahkam," *Semiotika-Q* 3, no. 2 (2023).

[11] Nanda Afriani, "Hukum Mengqasar Salat dalam Safar Maksiat" *skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2021).

[12]Muhammad Alfi, "Konsep Safar dan Rukhsah dalam Perjalanan Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Azhar" *skripsi* (Riau: Fak. Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Vol. 3, No. 6 (2026)
doi: 10.36701/fikrah.v3i6.3890

1. Pengertian Rukhsah, sebab dan Pembagiannya.

1.1. Pengertian Rukhsah

Rukhsah secara bahasa bermakna (اليسر و السهولة)yang berarti kemudahan,[13] Dan merupakan lawan dari sikap mempersulit. Adapun dalam konteks syariat, rukhsah berarti mengalihkan suatu ketentuan hukum dari keadaan yang berat menuju keadaan yang lebih ringan karena adanya uzur pada diri *mukallaf*. Jenis-jenis rukhsah pun beragam sesuai dengan perbedaan sebab-sebab yang melatarbelakanginya, yang pada dasarnya termasuk bagian dari kemurahan Allah Swt. atas hamba-Nya.[14] Rukhsah merupakan ketentuan hukum yang disyariatkan sebagai bentuk keringanan karena adanya uzur tertentu, meskipun hukum pengharamannya tetap ada.[15]

Rukhsah dalam syariat Islam dipahami sebagai bentuk keringanan hukum yang diberikan Allah Swt. untuk umat Islam sebagai wujud rahmat dan kasih sayang-Nya dalam beberapa keadaan tertentu, seperti menggugurkan sebagian kewajiban, meringankan sebagian yang lain, dan menunda pelaksanaannya bagi yang berhalangan. Rukhsah tidak boleh dilakukan dengan asal atau untuk bermudah-mudahan dalam beribadah, akan tetapi harus sesuai dengan tuntunan syariat. Berikut disebutkan beberapa sebab-sebab rukhsah: safar, sakit, adanya paksaan.

1.2. Sebab sebab Rukhsah.

Rukhsah dalam syariat Islam dipahami sebagai bentuk keringanan hukum yang diberikan Allah Swt. untuk umat Islam sebagai wujud rahmat dan kasih sayang-Nya dalam beberapa keadaan tertentu, seperti menggugurkan sebagian kewajiban, meringankan sebagian yang lain, dan menunda pelaksanaannya bagi yang berhalangan. Rukhsah tidak boleh dilakukan dengan asal atau untuk bermudah-mudahan dalam beribadah, akan tetapi harus sesuai dengan tuntunan syariat. Berikut disebutkan beberapa sebab-sebab rukhsah: *Pertama,* Safar: Seorang yang sedang dalam perjalanan jauh (musafir) diberikan keringanan untuk mengqasar (mengurangi jumlah rakaat) dan menjamak (menggabungkan dua salat dalam satu waktu), berbuka puasa, tayamum, mengusap *khuf*, dan beberapa bentuk keringanan lainnya. Adapun dalil yang menjelaskannya adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nisa /4: 101.

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ

Terjemahnya:

> Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar salat[16]

Kedua, Sakit: apabila seorang dalam keadaan sakit maka juga mendapat keringanan dalam beribadah, seperti bolehnya untuk tidak berpuasa, bertayammum ketika tidak memungkinkan menggunakan air, bolehnya salat dalam posisi duduk atau

[13]Abū ‘Abdillāh Badr al-Dīn Muḥammad bin ‘Abdillāh bin Bahādir al-Zarkasyī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 2 (Cet.I, Riyadh: Dār al-Kutub, 1414 H/1994 M), h. 32.

[14]Abū ‘Alī al-Syāshī, *Uṣūl al-Syāshī*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1404 H/1982 M), h. 385.

[15]Maryam Muḥammad Ṣāliḥ aẓ-Ẓufairī, *Muṣṭalaḥāt al-Mażāhib al-Fiqhiyyah wa Asrār al-Fiqh al-Marmūz fī al-A‘lām wa al-Kutub wa al-Ārā’ wa al-Tarjīḥāt*, (Cet.I, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1422 H/2002 M), h. 82.

[16]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, h. 127.

berbaring apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk berdiri serta rukhsah lainnya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah /2: 185.

وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

> Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.[17]

Ketiga, Adanya paksaan, lupa, ketidaktahuan dan kekeliruan, seperti orang yang lupa bahwa dirinya sedang berpuasa dan makan di siang hari, atau memakan bangkai dalam kondisi yang mendesak dan terpaksa. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah /2: 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

> Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[18]

Juga disebutkan dalam hadis:

إِنَّ اللَّهَ قد تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (رَوَهُ ابْنُ مَاجَه)[19]

Artinya:

> Sesungguhnya Allah Swt. mentolerir umatku atas kekeliruan, lupa, dan dipaksa. (H.R. Ibnu Mājah)

1.3. Pembagian Rukhsah

Terdapat tujuh pembagian rukhsah: *Pertama,* Rukhsah dalam bentuk pengguguran, yaitu gugurnya kewajiban suatu ibadah karena adanya uzur tertentu. Seperti gugurnya kewajiban salat karena uzur haid atau nifas. *Kedua,* Rukhsah dalam bentuk pengurangan, seperti mengqasar salat dalam keadaan safar, dalam hal ini, mengurangi jumlah rakaat salat. *Ketiga,* Rukhsah dalam bentuk Pengganti, yaitu

[17]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 37.
[18]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 35.
[19]Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 3 (Cet.I, Beirut: Dār ar-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 200.

mengganti suatu ibadah dengan ibadah lainnya. Misalnya, tayammum sebagai pengganti wudu ketika tidak ditemukan air, atau saat seorang tidak mampu menggunakan air karena sakit. *Keempat,* Rukhsah dalam bentuk pendahuluan, seperti menjamak antara salat zuhur dan asar di waktu zuhur atau dikenal dengan istilah jamak *taqdīm. Kelima,* Rukhsah dalam bentuk pengakhiran, seperti melakukan salat jamak *ta'khīr*, dan mengakhirkan puasa bagi wanita yang haid dan nifas. *Keenam,* Rukhsah pada kondisi terpaksa, seperti memakan bangkai dalam kondisi yang mendesak dan terpaksa. *Ketujuh,* Rukhsah dalam bentuk perubahan, seperti berubahnya tata cara pelaksanaan salat dalam salat *khauf*.[20]

2. Pengertian Safar, dasar hukum, batasan dan macam-macam safar.

2.1. Pengertian Safar.

Secara bahasa, kata safar bermakna "وضح و انكشف" yang berarti jelas dan tersingkap.[21] Makna ini berkaitan dengan kondisi seseorang yang keluar dari tempat tinggalnya sehingga keadaannya menjadi tampak atau jelas. Pada kamus Al-Munawwir, safar memiliki makna perjalanan.[22] Selain itu, safar juga memiliki makna lain, yaitu "قطع المسافة" yang berarti menempuh jarak/perjalanan.[23]

Imam al-Azhari mengatakan bahwa istilah safar digunakan karena dalam perjalanan, tersingkap karakter dan akhlak para musafir, sehingga tampaklah apa yang sebelumnya tersembunyi dari diri mereka tatkala mukim (menetap). Selain itu, orang yang melakukan sebuah perjalanan dinamakan sebagai musafir karena ia meninggalkan tempat tinggalnya atau lingkungan pemukiman, serta keluar menuju wilayah yang terbuka dan luas.[24]

Adapun secara istilah, terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan para ulama. Disebutkan dalam buku *Ṣalāt al-Musāfir*, safar adalah keluarnya seseorang dari tempat tinggalnya menuju suatu tempat tertentu dimana jarak diantaranya membolehkan seorang yang bepergian untuk mengqasar salat.[25]

2.2. Dasar Hukum Safar.

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa perjalanan atau safar memiliki kedudukan penting, diantaranya terdapat pada Q.S. Al-Mulk /67: 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahnya:

[20]Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad Āl Burnū Abū al-Ḥāriṡ al-Ghazzī, *al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*, (Cet.IV, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah al-'Ālamiyyah, 1416 H/1996 M), h. 229

[21]Kelompok Pakar Bahasa, *Al-Mu'jam al-Wasīt* (Cet. II; Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1392 H/1972 M), h. 432

[22]Achmad Warson, *Al-Munawwir Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), h. 743.

[23]Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Mūsā ibn Aḥmad ibn al-Ḥusayn, *Al-Bināyah Sharḥ al-Hidāyah*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1420 H/2000 M), h. 3.

[24]Jamāluddīn Muḥammad ibn Mukarram ibn 'Ālī ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Cet. III; Beirut, Lebanon: Dār Ṣādir, 1863), h. 368

[25]Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahf al-Qaḥṭānī, *Ṣalāt al-Musāfir* (Cet. I; Riyad: Maṭba'ah Safīr, 1432 H/2010 M), h. 5.

> Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.[26]

Disebutkan dalam tafsir ibnu katsir, ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia dianjurkan untuk melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di bumi sesuai kehendak, serta berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya untuk menjalankan berbagai bentuk usaha dan perdagangan, dan upaya tersebut tidak akan menghasilkan sesuatu tanpa adanya kemudahan dari Allah Swt.[27]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa safar memiliki kedudukan yang signifikan dalam Islam sebagai aktivitas yang diakui dan diatur oleh syariat, sehingga perlu untuk memahami konsep dan ketentuan-ketentuan dalam safar berdasarkan prinsip yang telah diatur dalam syariat.

2.3. Batasan-batasan Safar.

Safar merupakan suatu aktivitas yang membutuhkan jarak dan waktu tertentu. Dengan demikian, seseorang dikatakan melakukan perjalanan safar manakala memenuhi kategori jarak yang dikenal dan ditetapkan dalam syariat Islam. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan safar yang menjadikan seseorang berstatus sebagai musafir. Berikut beberapa pandangan ulama mengenai masalah tersebut.

Pertama, jarak minimal perjalanan yang menjadikan seseorang berstatus sebagai musafir adalah sekitar 16 *farsakh*, yaitu 4 *burud*, setara dengan 48 mil atau kurang lebih 80 kilometer. Jarak tersebut setara dengan perjalanan selama dua hari dalam kondisi normal dengan kecepatan berjalan yang wajar serta membawa barang bawaan berat sebagaimana kebiasaan musafir pada umumnya. Juga disebutkan bahwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar mengqasar salat dan berbuka puasa dalam perjalanan 4 *burud*, yaitu 16 *farsakh*.[28] Sebagaimana riwayat ‘Aṭā’ bin Abī Rabāḥ:

أَنَّ ابنَ عُمرَ وابنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما كانَا يُصلِّيانِ رَكعتينِ، ويُفطِرانِ في أَربعةِ بُرُدٍ فما فَوقَ ذلِك (رَوَاهُ البَيْهَقِي)[29]

Artinya:

> Dahulu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhum mengqasar salat dan tidak berpuasa apabila bersafar menempuh jarak 4 burud atau lebih. (H.R. Baihaqī)

Kedua, perjalanan yang ditempuh selama tiga hari tiga malam, dengan standar acuan perjalanan menggunakan unta atau berjalan kaki. Perjalanan tersebut tidak disyaratkan untuk dilakukan sepanjang hari hingga malam, tetapi cukup dari pagi sampai

[26]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, h. 830.

[27] Abū al-Fidā’ Ismā'īl bin ‘Umar bin Kaṡīr Al-Qurasyī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm* (Cet. I; Saudi: Dār Ibn al-Jawzī li al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 1431 H/2009 M), h. 334.

[28]Majma’ al-Malik Fahd li Ṭibā‘ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, *al-Fiqh al-Muyassar fī Ḍaw’i al-Kitāb wa al-Sunnah* (Madinah: Majma’ al-Malik Fahd li Ṭibā‘ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1423 H/2002 M), h. 89.

[29]Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn ‘Alī al-Bayhaqī, *al-Sunan al-Kabīr* (Cet. I; Kairoh: Markaz Hajar li al-Buḥūṡ wa al-Dirāsāt al-‘Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 1432 H/2011 M), h. 196.

waktu zawal (zuhur). Dengan demikian, yang menjadi ukuran adalah perjalanan dengan kecepatan sedang disertai waktu istirahat yang lazim.[30]

Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. bersabda:

لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلا مَعَ ذِيْ محرَمٍ (رَوَاهُ البُخَارِي)[31]

Artinya:

> Tidak boleh seorang wanita safar selama tiga hari (perjalanan) melainkan bersama dengan mahramnya. (H.R. Bukhārī)

Dalil tersebut juga menjadi dasar dilarangnya seorang muslimah untuk bepergian tanpa mahram. Dan salah satu alasan pelarangannya adalah adanya kekhawatiran terhadap keselamatan selama perjalanan serta kemungkinan munculnya fitnah maupun berbagai bentuk kemudaratan lainnya.

Ketiga, tidak ada batasan jarak tertentu dalam menentukan safar. Selama masyarakat setempat menganggap atau menyatakan perjalanan tersebut adalah safar, maka seseorang telah dikatakan sebagai musafir dan boleh mengqasar salat ataupun berbuka puasa didalamnya.

Imam Ibn Baz *rahimahullah* menyatakan, sebagian ulama berpendapat bahwa penentuan safar dikembalikan kepada *'urf* (kebiasaan yang berlaku dimasyarakat) dan tidak dibatasi oleh batasan jarak tertentu seperti ukuran kilometer. Dengan demikian, suatu perjalanan yang secara umum dipandang sebagai safar dalam kebiasaan masyarakat dikategorikan sebagai safar, sedangkan yang tidak dipandang demikian tidak termasuk dalam kategori tersebut.[32]

Secara umum, jumhur ulama berpendapat bahwa jarak safar yang membolehkan qasar salat adalah empat *burud*. Satu *burud* diperkirakan setara dengan perjalanan setengah hari, yakni empat *farsakh*, sedangkan satu *farsakh* setara dengan tiga mil. Oleh karena itu, apabila seseorang menempuh jarak sekitar enam belas *farsakh* maka menurut jumhur ulama ia diperbolehkan untuk melaksanakan qasar salat.[33]

2.4. Macam-Macam Safar.

Para ulama mengelompokkan safar berdasarkan tujuan dan bentuk pelaksanaannya menjadi tiga, yaitu: *Pertama,* Safar Taat: Safar taat adalah setiap safar yang dicintai oleh Allah Swt. dan Rasulullah saw. misalnya hijrah di jalan Allah Swt., perjalanan dalam rangka berdakwah di jalan Allah Swt., perjalanan untuk menuntut dan mengajarkan ilmu agama, berjihad di jalan Allah, menunaikan ibadah haji dan umrah, melaksanakan salat ditiga masjid utama, serta perjalanan untuk menyambung silaturahmi, menjenguk saudara, dan yang sejenisnya.[34]

Safar jenis ini merupakan safar yang dianjurkan dan mendapatkan keutamaan dalam Islam. Seperti halnya seorang yang bersafar untuk menuntut ilmu, ini merupakan bagian dari syariat Islam. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Taubah /9: 122.

---

[30]Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 2 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 1342.

[31]Abu 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al- Bukhārī al-Ju'fi, *Ṣahīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 368.

[32]Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahf al-Qaḥṭānī, *Ṣalāt al-Musāfir*, h. 42.

[33]Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahf al-Qaḥṭānī, *Ṣalāt al-Musāfir*, h. 40.

[34]Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdillāh al-Tuwayjirī, *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2 (Cet. I; Saudi: Bayt al-Afkār al-Duwaliyyah, 1430 H/2019 M), h. 531.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya:

> Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?.[35]

Kedua, Safar Mubah: Safar mubah merupakan perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan duniawi dan tidak disertai unsur kemaksiatan. Contoh safar mubah adalah perjalanan untuk tujuan perdagangan, perjalanan untuk rekreasi dalam batas yang dibolehkan, serta perjalanan untuk keperluan pengobatan, semua hal tersebut diperbolehkan.[36] *Ketiga,* Safar Maksiat: Safar maksiat adalah perjalanan yang bertujuan untuk memenuhi dorongan nafsu yang bertentangan dengan syariat, yang didalamnya terdapat praktik dosa besar dan perbuatan keji, waktu dihabiskan untuk meraih hal-hal yang terlarang, disertai pengabaian terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.[37]

Safar ini juga disebut sebagai safar haram, yaitu perjalanan yang dilakukan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt. dan Rasulullah saw. seperti, seorang yang melakukan perjalanan untuk menjual khamar, merampok, berjudi ataupun hal yang diharamkan lainnya.[38]

Jenis-jenis safar tersebut menjadi penting karena tujuan perjalanan memiliki pengaruh terhadap penilaian hukum dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan rukhsah bagi musafir.

3. Pengertian, dan Pembagian Maksiat

3.1. Pengertian Maksiat.

Secara bahasa, kata maksiat merupakan lawan dari ketaatan, ketakwaan atau keistiqamahan. Adapun secara istilah, maksiat berarti keluar dari ketaatan dan perbuatan yang menyelisihi perintah.[39] Orang yang bermaksiat merupakan orang yang lalai dalam menjalankan kewajiban, berbuat keburukan, pelaku dosa, serta termasuk dalam kategori orang yang fasik. Pelaku maksiat juga merupakan orang-orang yang mencampur amal saleh dengan perbuatan buruk atau tercela.[40]

[35]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 283.
[36]Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdillāh al-Tuwayjirī, *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, h. 531.
[37]Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdillāh al-Tuwayjirī, *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, h. 531.
[38] Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahf al-Qaḥṭānī, *Ṣalāt al-Musāfir*, h. 6.
[39]Kelompok Pakar Bahasa, *Al-Mu'jam al-Wasīt*, h. 606.
[40]Abd al-Rabb bin Nawwāb al-Dīn bin Gharīb al-Dīn Āl Nawwāb, *Asālīb Da'wah al-'Uṣāh, (Madinah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah*, 1424 H/2003 M), h. 150.

Apabila kemaksiatan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya disebutkan secara mutlak, maka didalamnya mencakup kekafiran dan kefasikan, sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Ibnu Taimiyah.[41] Allah Swt. berfirman pada Q.S. Al-Jin /72: 23.

وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

Terjemahnya:

> Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya sesungguhnya akan mendapat (azab) neraka Jahanam.[42]

Dalam pengertian lain, kemaksiatan adalah segala perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam. Seseorang yang meninggalkannya karena Allah Swt. Akan memperoleh pahala, sedangkan orang yang melakukannya dapat dikenai dosa atau sanksi. Maksiat juga merupakan bentuk sinonim dari kata *al-maḥẓūr* (perbuatan yang dilarang), *al-ḥarām* (yang diharamkan), dan *al-żanb* (dosa).[43]

3.2. Pembagian Maksiat.

Disebutkan dalam buku *Asālīb Da'wah al-'Uṣāh*, bahwasanya Imam Ibnu Qayyim membagi maksiat menjadi tiga: *Pertama,* Maksiat yang dikenai hukuman had tanpa disertai kafarat, seperti zina, pencurian, meminum khamar, dan *qaẓf*. *Kedua,* Maksiat yang dikenai kafarat tanpa adanya hukuman had, seperti menggauli istri di siang hari Ramadan atau saat ihram, dan menggauli istri yang telah di*ẓihar*. *Ketiga,* Maksiat yang tidak disertai ketentuan kafarat maupun hukuman had, seperti pencurian yang tidak memenuhi syarat diberlakukannya hukuman potong tangan, sumpah palsu dan perbuatan sejenis lainnya. Perbuatan seperti ini dapat diterapkan hukuman takzir.[44]

B. Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Mengenai Status Rukhsah Bagi Musafir dalam Safar Maksiat

1. Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Terhadap Status Rukhsah bagi Musafir dalam Safar Maksiat

Mazhab Hanafi adalah mazhab fikih yang di sandarkan penamaannya kepada Imam Abū Ḥanīfah, dan menjadi mazhab pertama dalam urutan empat mahzab yang besar. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 H/659 M dan meninggal dunia tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun.[45] Dalam penetapan hukum syar'i, mazhab Hanafi beristinbath dengan beberapa landasan hukum diantaranya adalah, al-Qur'an, sunah, Ijmak, perkataan sahabat, kias, istihsan dan urf.

Sementara mazhab Maliki adalah mazhab yang disandarkan penamaannya kepada Imam Malik. Nama lengkapnya adalah Mālik bin Anas bin Mālik bin Abī 'Āmir bin

[41]Syaikh al-Islām Aḥmad bin Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 7 (Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M) h. 59.

[42]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 851.

[43]Zakariyyā bin Muḥammad bin Aḥmad bin Zakariyyā al-Anṣārī, *Al-Ḥudūd al-Anīqah wa al-Ta'rīfāt al-Daqīqah*, (Cet.I, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1411 H/1991 M) h. 76.

[44]'Abd al-Rabb bin Nawwāb al-Dīn bin Gharīb al-Dīn Āl Nawwāb, *Asālīb Da'wah al-'Uṣāh*, h. 169.

[45]Mannā' bin Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī*, (Cet.V, Kairo: Maktabah Wahbah, 1422 H/2001 M), h. 328.

‘Amr bin al-Ḥāriṡ bin Ghaymān bin Khuṡayl bin ‘Amru bin al-Ḥāriṡ. Beliau termasuk salah satu imam besar yang berpengaruh dalam perkembangan ilmu Islam, dan merupakan pendiri mazhab Maliki. Dari segi nasab, beliau berasal dari keturunan Arab dan tergolong dalam generasi tabiin, yang dikenal sebagai Imam *Dār al-Hijrah*. Beliau biasa dipanggil dengan Abū ‘Abdillāh. Kedua orang tuanya merupakan orang Arab asli dan berasal dari Yaman. Ibunya adalah ‘Āliyah binti Syarīk al-Azdiyyah.[46] Dalam penetapan hukum syar’i mazhab Maliki beristinbath dengan beberapa landasan hukum diantaranya, *Al-Qur’an, Sunah*, baik yang diriwayatkan secara *mutawātir*, *masyhūr*, dan *āhād* dan hadis *mursal* dan menjadikannya hujjah, *Ijmak*, *Kias*, *‘Amal Ahlu Madīnah,*[47] *Fatwa Sahabat*,[48] *Syar’u Man Qablanā*,[49] *Al-Maṣālih al-Mursalah*,[50] *Istihsān*,[51].[52] *Saddu al-Zarāi’*.[53] *Istiṣhāb*.[54]

1.1. Pendapat Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang yang melakukan perjalanan dengan tujuan kemaksiatan seperti melakukan perjalanan untuk menjual khamar, merampok dan hal yang diharamkan lainnya tetap memperoleh rukhsah safar sebagaimana seorang yang melakukan perjalanan dengan tujuan ketaatan, seperti menunaikan ibadah haji dan umrah, jihad, atau menuntut ilmu.[55]

Imam ‘Alāuddīn al-Kāsānī pada kitabnya *Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’*, menyebutkan bahwa seorang yang melakukan perjalanan (musafir) berhak mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan ramadan seperti orang yang sakit, karena adanya uzur yang membolehkannya, dan wajib untuk menggantinya dihari lain. Hal tersebut berlaku bagi seorang yang melakukan perjalanan dengan tujuan ketaatan, hal-hal yang mubah, ataupun safar dengan tujuan kemaksiatan.[56]

Orang yang melakukan perjalanan merupakan sebab seseorang mendapatkan rukhsah. Karena yang menjadi sebab adanya rukhsah adalah hakikat keberadaan safar

[46]Hājjah Kawkab ‘Ubaid, *Fiqh al-‘Ibādāt ‘alā al-Maẓhab al-Mālikī*, (Cet.I, Damaskus: Maṭba‘ah al-Insyā, 1406 H/1986 M) h. 11.

[47]Abū al-Ḥasan ‘Alī bin ‘Umar al-Baghdādī, *Muqaddimah fī Uṣūl al-Fiqh*, (Cet.I, Riyad: Dār al-Mu‘allimah lī al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 1420 H/1999 M) h. 228.

[48]Muḥammad bin al-Ḥasan bin al-‘Arabī bin Muḥammad al-Ḥajwī al-Ṡa‘ālibī al-Ja‘farī al-Fāsī, *Al-Fikr al-Sāmī fī Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1 (Cet.I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1416 H/1995 M) h. 461.

[49]Waḥdah al-baḥṡ al-‘Ilmī, *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba’ah*, h. 78.

[50]Muḥammad Yaḥyā bin Muḥammad al-Mukhtār, *Īṣāl al-Sālik ilā Uṣūl Maẓhab al-Imām Mālik*, (Cet.I, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1427 H/2006 M) h. 184.

[51]Burhān al-Dīn bin Farḥūn al-Mālikī, *Kasyf al-Niqāb al-Ḥājib min Muṣṭalaḥ Ibnu al-Ḥājib*, (Cet.I, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1411 H/1990 M) h. 125.

[52]Waḥdah al-baḥṡ al-‘Ilmī, *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba’ah*, h. 81.

[53]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet.II, Damaskus: Dār al-Khayr li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 1427 H/2006 M) h. 279.

[54]Waḥdah al-baḥṡ al-‘Ilmī, *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba’ah*, h. 83.

[55]Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsā bin Aḥmad bin al-Ḥusayn, *Al-Bināyah Syarḥ al-Hidāyah*, Juz 3 (Cet.I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1420 H/2000 M) h. 35.

[56]‘Alā’ al-Dīn, Abū Bakr bin Mas‘ūd al-Kāsānī, *Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Syarā’i‘*, Juz 2 (Cet.I, Mesir: Maṭba‘ah Syarikah al-Maṭbū‘āt al-‘Ilmiyyah, 1327 H/1909 M) h. 94.

itu sendiri,[57] sehingga menunjukkan berlakunya hukum-hukum terkait rukhsah bagi setiap musafir baik pada safar taat maupun maksiat tanpa adanya perbedaan.[58]

Mazhab Hanafi juga menyimpulkan, bahwasanya safar adalah keadaan ketika seseorang keluar dari tempat tinggalnya menuju tempat tertentu, atau melakukan perjalanan dengan jarak dan waktu tempuh selama tiga hari atau lebih, dan selama seorang dikatakan sebagai musafir dan memenuhi kategori jarak yang dikenal dan ditetapkan dalam syariat Islam, maka musafir berhak untuk mendapatkan rukhsah, baik pada safar taat, safar mubah, maupun safar maksiat.[59]

Para ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa kemaksiatan bukan merupakan faktor diberikannya rukhsah atau keringanan hukum. Akan tetapi, sebabnya adalah kesulitan-kesulitan yang ada akibat perjalanan. Adapun hal yang diharamkan adalah kemaksiatan yang menyertai perjalanan tersebut, bukan safar itu sendiri. Oleh sebab itu, orang yang melakukan safar maksiat tetap boleh untuk mengambil rukhsah, karena kemaksiatan dianggap sebagai hal yang terpisah dari hakikat perjalanan tersebut.[60]

Diantara dalil terkait dengan rukhsah terdapat pada Q.S. Al-Nisa /4: 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

Terjemahnya:

> Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang yang kufur.[61]

Juga disebutkan dalam hadis Nabi saw:

يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ (رَوَاهُ التِرْمِذِي)[62]

Artinya:

> Seorang mukim boleh mengusap khuf dalam rentang waktu satu hari satu malam, sedangkan musafir tiga hari tiga malam. (H.R. Tirmiżī)

Menurut mazhab Hanafi, dalil tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan antara satu musafir dengan musafir yang lain. Oleh sebab itu, wajib mengamalkan keumuman dan kemutlakan dalil tersebut.[63] Adapun hakikat safar itu sendiri pada dasarnya bukanlah suatu kemaksiatan, karena safar hanya sebatas menempuh jarak tertentu, dan kemaksiatan merupakan sesuatu yang terjadi setelah perjalanan atau perbuatan yang menyertai perjalanan seperti melarikan diri dari kewajiban maupun

[57]Abū Bakr ibn ‘Alī ibn Muḥammad Al-Ḥaddādī Al-‘Abādī Al-Zabīdī Al-Yamanī Al-Ḥanafī, *Al-Jawharah Al-Nayyirah*, Juz 1 (Cet. I; t.t.: Al-Maṭba'ah Al-Khayriyyah, 1322 H/1904 M), h. 88.

[58]Dubyān bin Muḥammad al-Dubyān, *Mawsū‘ah Aḥkām al-Ṭahārah, Adillah wa Masā’il wa Qawā‘id wa Ḍawābiṭ*, Juz3 (Cet. III; t.t.: t.p., 1436 H/2014 M), h. 293.

[59]‘Alā’ al-Dīn, Abū Bakr bin Mas‘ūd al-Kāsānī, *Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Syarā’i‘*, Juz 2, h. 94.

[60]Dubyān bin Muḥammad al-Dubyān, *Mawsū‘ah Aḥkām al-Ṭahārah, Adillah wa Masā’il wa Qawā‘id wa Ḍawābiṭ*, Juz 3, h. 296.

[61]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 127.

[62]Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Sawrah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥḥāk al-Tirmizī, ***Sunan al-Tirmizī***, Juz 1, h. 159.

[63]Alā’ al-Dīn Abū Bakr bin Mas’ūd al-Kāsānī, *Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Syarā’i‘*, Juz 1, h. 93.

durhaka kepada kedua orang tua. Dengan demikian, unsur maksiat tersebut tidak memengaruhi kebolehan seseorang untuk memperoleh rukhsah.[64]

Seorang yang mukim terkadang melakukan berbagai bentuk kemaksiatan, seperti berbuat zalim terhadap kaum muslimin atau melakukan tindakan yang melampaui batas. Bahkan terkadang bentuk kemaksiatan tersebut lebih berat dibanding perjalanan yang dilakukan dengan tujuan kemaksiatan. Namun demikian, orang yang mukim tetap diperbolehkan untuk mengusap khuf, karena mengusap khuf dipandang sebagai bagian dari rukhsah atau keringanan hukum dalam syariat.[65]

Ulama mazhab Hanafi juga mengkiaskan hal ini dengan seorang perempuan yang telah berzina lalu hamil akibat dari perzinaan tersebut dan kemudian melahirkan anak, maka selama ia berada dalam masa nifas, ia tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat dan puasa. Gugurnya berbagai kewajiban tersebut merupakan bentuk rukhsah atau keringanan baginya, padahal ia melakukan kemaksiatan atau perzinaan. Begitu halnya dengan seorang yang melakukan safar maksiat, ia tetap berhak mendapatkan rukhsah.[66] Dalam hal ini, seorang yang melakukan safar maksiat tetap diperbolehkan untuk menqasar salat, menjamak antara dua salat, berbuka puasa, tayammum, melaksanakan salat sunah di atas kendaraan, dan rukhsah lainnya.

Imam al-Ghaznawī mengatakan dalam kitabnya bahwa pada hakikatnya, rukhsah merupakan rahmat Allah Swt. yang diberikan kepada manusia. Allah Swt. maha pemurah, tetap memberikan rezeki bagi orang-orang kafir dan tidak menahan rezeki tersebut, meskipun rezeki tersebut dapat menjadi sebab tetap berlanjutnya kekufuran mereka, maka bagaimana mungkin Allah Swt. menahan rukhsah hanya karena seseorang berada dalam keadaan fasik.[67] Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw.:

إِنَّ اللهَ يحب أَن يُؤْتَى بِرُخصِهِ كَمَا يُحِبُّ أَن يُؤْتى بِعَزَائِمِهِ (رَوَاهُ ابْنُ حِبَّان)[68]

Artinya:

> Sesungguhnya Allah menyukai tatkala diambil rukhsah dari-Nya sebagaimana Allah mencintai ketika dilaksanakan perintah-perintah-Nya. (H.R. Ibnu Ḥibbān)

هَذِهِ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ (رَوَاهُ مُسْلِم)[69]

Artinya:

> Itu adalah sedekah Allah bagimu, maka terimalah sedekah-Nya tersebut. (H.R. Muslim)

---

[64]Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsā bin Aḥmad bin al-Ḥusayn, *Al-Bināyah Syarḥ al-Hidāyah*, Juz 3, h. 35.

[65]Dubyān bin Muḥammad al-Dubyān, *Mawsū'ah Aḥkām al-Ṭahārah, Adillah wa Masā'il wa Qawā'id wa Ḍawābiṭ*, Juz 3, h. 295.

[66]Jārullāh Abū al-Qāsim Maḥmūd bin 'Umar al-Zamakhsyarī, *Al- Ru'ūs al-Masā'il: al-Masā'il al-Khilāfiyyah bayna al-Ḥanafiyyah wa al-Syāfi'iyyah*, (Cet.I, Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1407 H/1987 M), h. 176.

[67]'Umar bin Isḥāq bin Aḥmad al-Hindī al-Ghaznawī, *Al-Ghurrah al-Munīfah fī Taḥqīq Ba'ḍ Masā'il al-Imām Abī Ḥanīfah*, (Cet. I; t.t.: Mu'assasah al-Kutub al-Ṣaqāfiyyah, 1406 H/1986 M) h. 45.

[68]Abū al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Aḥkām*, (Cet.VII, Riyad: Dār al-Falaq, 1424 H/2003 M) h. 125.

[69]Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Cet. I; Kairoh: Maṭba'ah 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāhu, 1374 H/1955 M) h. 478.

1.2. Pendapat Mazhab Maliki

Menurut ulama mazhab Maliki, mereka berpendapat bahwasanya jika seorang melakukan perjalanan dengan tujuan kemaksiatan (safar maksiat), ia tidak berhak untuk memperoleh rukhsah safar sebagaimana orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan ketaatan, dan ini merupakan pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki.[70] Hal ini disebabkan karena rukhsah disyariatkan sebagai bentuk keringanan dan bantuan bagi musafir dalam melakukan perjalanannya. Jika seorang melakukan safar maksiat, maka perjalanannya dipandang sebagai perbuatan yang terlarang, dan memberikan bantuan terhadap sesuatu yang terlarang juga tidak diperbolehkan, sebagaimana tidak dibolehkannya memberikan bantuan seseorang yang ingin melakukan pembunuhan.[71]

Dalam ketentuan hukum syariat Islam, Allah Swt. memerintahkan Hamba-Nya agar tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Sebaliknya, Islam melarang memberikan bantuan dalam berbuat dosa dan permusuhan. Allah Swt. berfirman pada Q.S. Al-Mā'idah /5: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

> Tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.[72]

Oleh karena itu, setiap bentuk bantuan yang mendukung terlaksananya perbuatan dosa tidak diperbolehkan, meskipun bantuan tersebut tidak diberikan secara langsung. Sehingga pemberian rukhsah kepada pelaku safar maksiat di pandang sebagai bentuk kemudahan baginya yang secara tidak langsung dapat membantu terlaksananya kemaksiatan tersebut.[73]

Bagi seorang musafir, salat fardu dapat dilaksanakan dengan cara mengqasar (mengurangi jumlah rakaat menjadi dua), kecuali pada salat magrib. Keringanan ini hanya diberikan kepada musafir yang melakukan perjalanan untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat.[74] Imam Al-Dasūqī menjelaskan bahwasanya menqasar salat bagi musafir merupakan suatu yang sangat dianjurkan (*sunnah muakkadah*) baik untuk laki-laki maupun perempuan, dengan syarat perjalanan yang dilakukan tersebut bukan untuk tujuan kemaksiatan. Oleh karena itu, rukhsah qasar salat tidak diberikan kepada musafir yang melakukan safar maksiat. Akan tetapi jika musafir tersebut bertaubat, maka

---

[70]Syams al-Dīn Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Muḥammad bin 'Abd al-Raḥmān al-Ṭarābulusī al-Maghribī, *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 1 (Cet. 3; Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/ 1992 M) h. 194.

[71]Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Alī bin 'Umar al-Tamīmī al-Māzarī al-Mālikī, *Syarḥ al-Talqīn*, Juz 1 (Cet.I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1429 H/2008 M) h. 933.

[72]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 144.

[73]Muḥammad bin Ḥammūd al-Wā'ilī, *Bughyah al-Muqtaṣid, Syarḥ Bidāyah al-Mujtahid li Ibn Rusyd al-Ḥafīd*, Juz 4 (Cet.I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1440 H/2019 M) h. 2103.

[74]Abū 'Umar Yūsuf bin 'Abdillāh bin Muḥammad bin 'Abd al-Barr bin 'Āṣim al-Namarī al-Qurṭubī, *Al-Kāfī fī Fiqh Ahli al-Madīnah*, Juz 1 (Cet.I; Riyad: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṡah, 1400 H/1980 M) h. 244.

ia berhak untuk memperoleh rukhsah qasar salat selama masih tersisa jarak perjalanan safar yang memenuhi syarat diperbolehkannya qasar salat.[75]

Diantara dalil yang mendasari bolehnya mengqasar salat adalah hadis dari Anas bin Malik *radiyallāhu 'anhu* :

سَافَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ، فَلا زَال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْصُرُ الصَّلاةَ أَوْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ (رَوَاهُ البُخَارِي)[76]

Terjemahnya:

> Kami pernah bepergian bersama Nabi saw. menuju Makkah, Beliau senantiasa mengqasar salat atau salat dua rakaat hingga beliau kembali ke Madinah. (H.R. Bukhārī)

Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya selama seseorang berstatus sebagai musafir dan perjalanan tersebut telah memenuhi syarat-syarat safar, maka ia berhak untuk memperoleh rukhsah safar yaitu melaksanakan qasar salat hingga ia kembali ke tempat tinggalnya.[77] Dan diantara syarat yang disebutkan untuk kebolehan qasar salat adalah perjalanan tersebut harus bersifat mubah atau perjalanan yang bernilai ketaatan, bukan perjalanan yang diharamkan, seperti perjalanan dengan tujuan untuk melakukan kemaksiatan.[78]

Para ulama mazhab Maliki membedakan antara orang yang melakukan safar maksiat (*al-'āṣī bisafarihi*) dan orang yang bermaksiat dalam perjalanannya (*al-'āṣī fī safarihi*), atau orang yang melakukan perjalanan yang pada dasarnya mubah, kemudian melakukan kemaksiatan ditengah perjalanannya, seperti meminum khamar. Pada jenis yang pertama, musafir tersebut tidak berhak untuk mendapatkan rukhsah-rukhsah safar. Adapun orang yang bermaksiat dalam perjalanannya maka ia tetap diperbolehkan untuk memanfaatkan rukhsah-rukhsah safar.[79]

Dalam kitab *Bughyah al-Muqtaṣid*, dijelaskan bahwa sebab perbedaan pendapat dikalangan ulama pada pembahasan ini adalah perbedaan pemahaman makna antara lafaz yang zahir (ظاهر اللفظ) dengan dalil praktis (دليل الفعل). Ulama yang memfokuskan pada *masyaqqah* atau makna zahir dari safar, tidak membedakan antara safar taat dan safar maksiat. Adapun yang mengacu pada dalil praktis atau *dalīl al-fi'l* mengatakan bahwa rukhsah tersebut tidak boleh diberikan kecuali pada perjalanan yang

[75]Muḥammad bin Aḥmad bin 'Arafah al-Dasūqī al-Mālikī, *Ḥāsyiyah al-Dasūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.) h. 358.

[76] Abu 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al- Bukhārī al-Ju'fi, *Ṣahīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. V; Damaskus: Dār Yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 367.

[77]'Aṭiyyah bin Muḥammad Sālim, *Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Juz 92 (t.t.: Mawqi' al-Syabakah al-Islāmiyyah, t.th.) h. 9.

[78]Al-Ḥājjah Kawkab 'Ubayd, *Fiqh al-'Ibādāt 'alā al-Mażhab al-Mālikī*, (Cet.I; Damaskus: Maṭba'ah al-Insyā', 1406 H/1986 M) h. 229.

[79]Aḥmad bin Muḥammad al-Ṣāwī al-Mālikī, *Bulghah al-Sālik li Aqrab al-Masālik ilā Mażhab al-Imām Mālik (Ḥāsyiyah al-Ṣāwī 'alā al-Syarḥ al-Ṣaghīr)*, Juz 1 (Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1372 H/ 1952 M) h. 171.

mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sebagaimana Nabi saw. beserta para sahabat melakukan perjalanan dengan tujuan ketaatan atau yang dibenarkan syariat.[80]

Pada pembahasan ini, terdapat dua pendapat dalam ulama mazhab Maliki. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki adalah tidak membolehkan rukhsah safar seperti qasar salat pada safar maksiat, dan hal ini juga merupakan pendapat yang dikuatkan oleh jumhur ulama (Malik, Syafii, dan Ahmad)[81] Namun, terdapat pendapat lain dari ulama mazhab Maliki yang membolehkannya, yaitu Ziyād bin ʻAbd al-Raḥmān al-Andalusī, yang mengatakan bahwa seorang yang melakukan perjalanan untuk tujuan maksiat tetap diperbolehkan mengqasar salat dan berbuka puasa pada bulan Ramadan. Dengan demikian, ia menyamakan status hukum seluruh rukhsah safar tersebut, sebagaimana pendapat mazhab Hanafi.[82]

Dalam safar maksiat, ulama mazhab Maliki membedakan status rukhsah yang secara khusus berkaitan dengan safar dan rukhsah yang berlaku baik dalam keadaan safar maupun ketika mukim. Rukhsah yang secara khusus berkaitan dengan safar, seperti qasar dan jamak salat, gugurnya kewajiban salat jumat, ataupun berbuka puasa pada bulan Ramadan, hanya dapat diberikan apabila perjalanan yang dilakukan untuk ketaatan bukan perjalanan untuk tujuan kemaksiatan (safar maksiat). Adapun rukhsah yang berlaku baik dalam keadaan safar maupun ketika mukim, seperti kebolehan memakan bangkai bagi dalam kondisi darurat, mengusap khuf, dan bolehnya tayammum, maka seorang tetap berhak mendapatkan rukhsah tersebut meskipun dalam safar maksiat.[83]

Pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki sebagaimana yang disebutkan Imam al-Bāji pada kitab *al-Muntaqā*, bahwa seorang yang melakukan safar maksiat tetap diperbolehkan untuk memakan bangkai ketika berada dalam kondisi darurat, tetapi tidak diperbolehkan untuk mengqasar salat maupun berbuka puasa. Dalam penjelasannya, Ibnu Khuwaiz Mandād mengatakan bahwa kebolehan memakan bangkai ketika berada dalam kondisi darurat berlaku sama antara orang yang taat maupun pelaku maksiat, karena hukum tersebut didasarkan pada kondisi darurat baik ketika mukim maupun dalam perjalanan, adapun qasar salat dan berbuka puasa merupakan rukhsah yang secara khusus disyariatkan karena adanya safar.[84]

Pada permasalahan ini, para ulama menetapkan satu kaidah fikih yang terkenal, yaitu:

[80]Muḥammad bin Ḥammūd al-Wā'ilī, *Bughyah al-Muqtaṣid, Syarḥ Bidāyah al-Mujtahid li Ibn Rusyd al-Ḥafīd*, h. 2104.

[81]Abū ʻAbdillāh Muḥammad bin ʻAlī bin ʻUmar al-Tamīmī al-Māzarī al-Mālikī, *Syarḥ al-Talqīn*, Juz 1, h. 933.

[82]Abū al-Walīd Sulaymān bin Khalaf bin Sa'd bin Ayyūb bin Wāriṡ al-Tujībī al-Qurṭubī al-Bājī al-Andalusī, *Al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa'*, Juz 3 (Cet.I; Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1332 H/ 1914 M) h. 140.

[83]Abū ʻAbdillāh Muḥammad al-Kharasyī, *Syarḥ al-Kharasyī ʻalā Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 1 (Cet. 2; Mesir: al-Maṭbaʻah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1317 H/ 1899 M) h. 179.

[84]Abū ʻAbdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmiʻ li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 2 (Cet. 2; Mesir: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/ 1964 M) h. 233.

الرُّخَصُ لا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي[85]

Artinya:

Rukhsah (keringanan) tidak dikaitkan dengan kemaksiatan.

Kaidah ini menunjukkan bahwa rukhsah tidak dapat diberlakukan pada hal-hal yang mengandung kemaksiatan. Oleh karena itu, seorang yang melakukan safar maksiat tidak dapat memperoleh rukhsah safar. Akan tetapi, perlu diarahkan, dicegah dan dibimbing agar meninggalkan perbuatan tersebut serta kembali kepada ketentuan yang benar sesuai dengan syariat Islam.[86]

C. Perbedaan dan Persamaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Terhadap Status Rukhsah bagi Musafir dalam Safar Maksiat

Setelah memaparkan pandangan kedua mazhab terkait pemberian rukhsah bagi musafir dalam safar maksiat, dapat diketahui bahwa kedua mazhab tersebut memiliki persamaan dan perbedaan pendapat. Sehingga perlu analisis yang lebih lanjut untuk memahami persamaan dan perbedaan kedua pendapat tersebut secara mendalam.

1. Persamaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan sebelumnya terkait pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki terhadap status rukhsah bagi musafir dalam safar maksiat, dapat dipahami bahwasanya kedua mazhab tersebut sepakat bahwa seseorang dikatakan sebagai musafir ketika telah terpenuhi ketetapan batas jarak yang ditempuh dalam safar dan juga kedua mazhab berpendapat bahwa rukhsah merupakan bentuk kemudahan dan kasih sayang dari Allah Swt. bagi hamba-Nya.

Syariat Islam tidak diturunkan untuk mempersulit, melainkan memberikan kemaslahatan dan kemudahan dalam melaksanakan berbagai macam ibadah, dan safar merupakan salah satu sebab seseorang mendapatkan rukhsah, seperti bolehnya untuk menjamak dan mengqasar salat, berbuka puasa pada bulan Ramadan, mengusap khuf, dan berbagai rukhsah lainnya.

Kedua mazhab tersebut sepakat bahwa Islam memerintahkan untuk melakukan perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah Swt. atau hal-hal mubah yang tidak menyelisihi ketentuan syariat, sedangkan perjalanan dalam rangka kemaksiatan merupakan perbuatan tercela yang dilarang serta tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Namun, juga didapati sebagian orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, sehingga para ulama berbeda pendapat dalam menentukan status rukhsah bagi pelakunya. Akan tetapi kedua mazhab tersebut tetap melandaskan pendapat mereka pada dalil-dalil yang kuat baik dari Al-Qur'an maupun sunah Nabi saw.

2. Perbedaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki

[85]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mażāhib al-Arba'ah*, Juz 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/ 2006 M) h. 721.

[86]Muḥammad bin Ḥammūd al-Wā'ilī, *Bughyah al-Muqtaṣid, Syarḥ Bidāyah al-Mujtahid li Ibn Rusyd al-Ḥafīd*, h. 2105.

Ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berbeda pendapat dalam menentukan status rukhsah bagi musafir dalam safar maksiat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang yang melakukan perjalanan dengan tujuan kemaksiatan tetap berhak memperoleh rukhsah safar sebagaimana orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan ketaatan, selama memenuhi syarat sebagai musafir.[87] Musafir tersebut berhak untuk mendapatkan rukhsah menqasar dan menjamak salat, mengusap khuf, tayammum, dan berbagai rukhsah lainnya.

Sebaliknya, ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa pelaku safar maksiat tidak berhak memperoleh rukhsah yang secara khusus disyariatkan karena adanya safar itu sendiri, seperti menqasar dan menjamak salat, gugurnya kewajiban salat jumat, serta berbuka puasa di bulan Ramadan.[88]

Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berbeda pendapat pada ilat atau sebab diberikannya rukhsah. Menurut mazhab Hanafi, sebab utama adanya rukhsah adalah keberadaan safar itu sendiri. Selama seorang masih berstatus sebagai musafir dan memenuhi ketentuan jarak safar, maka ia tetap berhak memperoleh rukhsah. Ulama mazhab Hanafi berpegang pada keumuman lafaz yang menyebutkan kata safar secara mutlak.[89]

Sementara itu, ulama Mazhab Maliki memandang bahwa tujuan perjalanan merupakan unsur penting dalam penetapan rukhsah. Menurut mereka, perjalanan yang membolehkan seseorang untuk memperoleh rukhsah safar adalah perjalanan yang dibenarkan oleh syariat islam, bukan perjalanan dengan tujuan kemaksiatan.[90] Selain itu, mazhab Maliki juga memandang bahwa pemberian rukhsah kepada pelaku safar maksiat dapat dipahami sebagai bentuk bantuan yang dapat mempermudah terlaksananya kemaksiatan tersebut.[91]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa seorang yang melakukan safar maksiat tidak berhak untuk memperoleh rukhsah safar sebagaimana orang yang melakukan perjalanan pada hal yang dibenarkan dan tidak menyelisihi syariat Islam atau pada hal-hal yang bersifat mubah, dan hal ini juga merupakan pendapat yang dikuatkan oleh jumhur ulama.

KESIMPULAN

Status rukhsah pada safar maksiat dalam mazhab Hanafi sama halnya dengan safar dalam rangka ketaatan, artinya semua rukhsah yang diberikan dalam safar ketaatan seperti mengqasar salat, tidak berpuasa di bulan Ramadan, gugurnya kewajiban salat jum'at. Adapun mazhab Maliki tetap tidak mendapatkan rukhsah. Persamaan dari kedua mazhab adalah bahwa kedua mazhab memandang bahwa safar memiliki ketetapan pada

[87]Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsā bin Aḥmad bin al-Ḥusayn, *Al-Bināyah Syarḥ al-Hidāyah*, Juz 3, h. 35.

[88]Abū 'Abdillāh Muḥammad al-Kharasyī, *Syarḥ al-Kharasyī 'alā Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 1, h. 179.

[89]Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 1, h. 93.

[90]Syams al-Dīn Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Muḥammad bin 'Abd al-Raḥmān al-Ṭarābulusī al-Maghribī, *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 1, h. 194.

[91]Muḥammad bin Ḥammūd al-Wā'ilī, *Bughyah al-Muqtaṣid, Syarḥ Bidāyah al-Mujtahid li Ibn Rusyd al-Ḥafīd*, Juz 4, h. 2103.

jarak tempuh perjalanan dan memiliki hukum yang harus di hormati dan ditaati, adapun perbedaannya adalah bahwa mazhab Hanafi lebih melihat pada dalil umum tentang pembolehannya sementara mazhab Maliki lebih melihat pada kekhususan dalil dalam pelarangannya

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

Al-Andalusī, Abū al-Walīd Sulaymān bin Khalaf bin Sa'd bin Ayyūb bin Wāriṡ al-Tujībī al-Qurṭubī al-Bājī. *Al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa'*. Juz 3. Cet. I; Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1332 H/1914 M.

Al-Anṣārī, Abū Yūsuf Ya'qūb bin Ibrāhīm. *Al-Kharrāj*. Al-Maktabah al-Azhariyah li al-Turāṡ, 1431 H/2010 M.

Al-Anṣārī, Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṣ 'Umar bin 'Alī. *Al-Asybāh wa al-Naẓā'ir*. Juz 1. Cet. I; Mesir: Dār Ibn 'Affān li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1431 H/2010 M.

Al-Anṣārī, Zakariyyā bin Muḥammad bin Aḥmad bin Zakariyyā. *Al-Ḥudūd al-Anīqah wa al-Ta'rīfāt al-Daqīqah*. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1411 H/1991 M.

Al-'Arabī, Abū 'Āṣim Basyīr Ḍayf bin Abī Bakr bin al-Basyīr bin 'Umar. *Maṣādir al-Fiqh al-Mālikī*. Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1429 H/2008 M.

Al-'Asqalānī, Abū al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar. *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Aḥkām*. Cet. VII; Riyad: Dār al-Falaq, 1424 H/2003 M.

Al-'Awāḍī, 'Abdullāh bin 'Abduh. *Rawḍah al-'Ābidīn*. Cet. I; Yaman: Maktabah al-Jīl al-Jadīd, 1439 H/2018 M.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi V. Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Al-Baghdādī, Abū al-Ḥasan 'Alī bin 'Umar. *Muqaddimah fī Uṣūl al-Fiqh*. Cet. I; Riyad: Dār al-Mu'allimah li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1420 H/1999 M.

Al-Balkhī, Abū al-Ḥasan Muqātil bin Sulaimān bin Basyīr al-Azdī. *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān*. Juz 5. Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ, 1423 H/2002 M.

Bāsyā, Aḥmad Taymūr. *Naẓrah Tārīkhiyyah fī Ḥudūṡ al-Mażāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*. Cet. I; Beirut: Dār al-Qādirī li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1411 H/1990 M.

Al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn 'Alī. *Al-Sunan al-Kabīr*. Cet. I; Kairoh: Markaz Hajar li al-Buḥūṡ wa al-Dirāsāt al-'Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 1432 H/2011 M.

Al-Dasūqī al-Mālikī, Muḥammad bin Aḥmad bin 'Arafah. *Ḥāsyiyah al-Dasūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*. Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Al-Dubayyān, Abū 'Umar Dubayyān bin Muḥammad. *Mawsū'ah Aḥkām al-Ṣalawāt al-Khams*. Juz 18. Cet. I; Mesir: Dār al-Lu'lu'ah li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1446 H/2024 M.

Al-Dubayyān, Abū 'Umar Dubayyān bin Muḥammad. *Mawsū'ah Aḥkām al-Ṭahārah, Adillah wa Masā'il wa Qawā'id wa Ḍawābiṭ*. Juz 3. Cet. III; t.t.: t.p., 1436 H/2014 M.

Al-Fāsī, Muḥammad bin al-Ḥasan bin al-'Arabī bin Muḥammad al-Ḥajwī al-Ṣa'ālibī al-

Ja'farī. *Al-Fikr al-Sāmī fī Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī*. Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H/1995 M.

Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muhammad. *Al-Musṭaṣfā*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/1993 M.

Al-Ghaznawī, 'Umar bin Isḥāq bin Aḥmad al-Hindī. *Al-Ghurrah al-Munīfah fī Taḥqīq Ba'ḍ Masā'il al-Imām Abī Ḥanīfah*. Cet. I; t.t.: Mu'assasah al-Kutub al-Ṡaqāfiyyah, 1406 H/1986 M.

Al-Ghazzī, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad Āl Burnū Abū al-Ḥāriṡ. *Al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*. Cet. IV; Beirut: Mu'assasah al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1416 H/1996 M.

Al-Ḥanafī, Abū Bakr ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Ḥaddādī al-'Abādī al-Zabīdī al-Yamanī. *Al-Jawharah al-Nayyirah*. Juz 1. Cet. I; t.t.: al-Maṭba'ah al-Khayriyyah, 1322 H/1904 M.

Hasan, M. Iqbal. *Analisis Data Penelitian Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Ḥawwā, Aḥmad Sa'īd. *Al-Madkhal Ilā Mażhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nu'mān*. Cet. I; Jeddah: Dār al-Andalus al-Khaḍrā' li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1423 H/2002 M.

Al-Ḥusayn, Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsā bin Aḥmad bin. *Al-Bināyah Syarḥ al-Hidāyah*. Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1420 H/2000 M.

Ibn Taymiyyah, Syaikh al-Islām Aḥmad. *Majmū' al-Fatāwā*. Juz 7. Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M.

Al-Ju'fī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl Al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 1. Cet. V; Damaskus: Dār Yamāmah, 1414 H/1993 M.

Al-Kāsānī, 'Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd. *Badā'I' al-Ṣanā'I' fī Tartīb al-Syarā'I'*. Juz 1-2. Cet. I; Mesir: Maṭba'ah Syarikah al-Maṭbū'āt al-'Ilmiyyah, 1327 H/1909 M.

Kelompok Pakar Bahasa. *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Cet. II; Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1392 H/1972 M.

Al-Kharasyī, Abū 'Abdillāh Muḥammad. *Syarḥ al-Kharasyī 'alā Mukhtaṣar Khalīl*. Juz 1. Cet. 2; Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1317 H/1899 M.

M, Hajar. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

Al-Madanī, Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣbaḥī. *Al-Muwaṭṭa'*. Juz 1. Cet. I; Uni Emirat Arab: Mu'assasah Zāyid bin Sulṭān Āl Nahyān li al-A'māl al-Khayriyyah wa al-Insāniyyah, 1425 H/2004 M.

Al-Magribī, Syams al-Dīn Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Muḥammad bin 'Abd al-Raḥmān al-Ṭarābulusī. *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Juz 1. Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M.

Al-Majlis al-A'lā li al-Syu'ūn al-Islāmiyyah. *Mausū'ah al-Mafāhīm al-Islāmiyyah al-'Āmmah*. Mesir: al-Majlis al-A'lā li al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, t.th.

Majma' al-Malik Fahd lī Ṭibā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf. *Al-Fiqh al-Muyassar fī Ḍaw'i al-Kitāb wa al-Sunnah*. Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1423 H/2002 M.

Al-Mālikī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Alī bin 'Umar al-Tamīmī al-Māzarī. *Syarḥ al-Talqīn*. Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1429 H/2008 M.

Al-Mālikī, Abū al-'Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin 'Abd al-Raḥmān. *Juz'u min Syarḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl fī 'Ilm al-Uṣūl*. Juz 2. Jāmi'ah Ummu al-Qurā, Risālah

‘Ilmiyyah, 1421 H/2000 M.

Al-Mālikī, Burhān al-Dīn bin Farḥūn. *Kasyf al-Niqāb al-Ḥājib min Muṣṭalaḥ Ibnu al-Ḥājib*. Cet. I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1411 H/1990 M.

Manẓūr, Jamāluddīn Muḥammad ibn Mukarram ibn ‘Ālī ibn. *Lisān al-‘Arab*. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1863.

Al-Mukhtār, Muḥammad Yaḥyā bin Muḥammad. *Īṣāl al-Sālik ilā Uṣūl Mażhab al-Imām Mālik*. Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1427 H/2006 M.

Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 1-2. Cet. I; Kairoh: Maṭba’ah ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāhu, 1374 H/1955 M.

Al-Naisābūrī, Muḥammad bin Ibrāhīm bin al-Munżir. *Al-Ijmā‘*. Cet. I; t.t.: Dār al-Muslim, 1425 H/2004 M.

Al Nawwāb, Abd al-Rabb bin Nawwāb al-Dīn bin Gharīb al-Dīn. *Asālīb Da‘wah al-‘Uṣāh*. Madinah: Al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah, 1424 H/2003 M.

Al-Nu’mān, Abū Ḥanīfah. *Al-Fiqh al-Akbar*. Cet. I; Uni Emirat Arab: Maktabah al-Furqān, 1419 H/1999 M.

Al-Qaḥṭānī, Sa’īd ibn ‘Alī ibn Wahf. *Ṣalāt al-Musāfir*. Cet. I; Riyad: Maṭba’ah Safīr, 1432 H/2010 M.

Al-Qāsimī, Muḥammad Jamāl al-Dīn ibn Muḥammad Sa’īd ibn Qāsim al-Ḥallāq. *Maw’iẓah al-Mu’minīn min Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1995 M.

Al-Qaṭṭān, Mannā’ bin Khalīl. *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*. Cet. V; Kairo: Maktabah Wahbah, 1422 H/2001 M.

Al-Qazwīnī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2009 M.

Al-Qurasyī, Abū al-Fidā’ Ismā'īl bin ‘Umar bin Kaśīr. *Tafsīr al-Qur’ān al-'Aẓīm*. Cet. I; Saudi: Dār Ibn al-Jawzī li al-Nasyr wa al-Tawzī’, 1431 H/2009 M

Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*. Juz 2. Cet. 2; Mesir: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M.

Al-Qurṭubī, Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdillāh bin Muḥammad bin ‘Abd al-Barr bin ‘Āṣim al-Namarī. *al-Kāfī fī Fiqh Ahli al-Madīnah*. Juz 1. Cet. I; Riyad: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṡah, 1400 H/1980 M.

Sālim, ‘Aṭiyyah bin Muḥammad. *Syarḥ Bulūgh al-Marām*. Juz 92. t.t.: Mawqi’ al-Syabakah al-Islāmiyyah, t.th.

Al-Ṣāwī al-Mālikī, Aḥmad bin Muḥammad. *Bulghah al-Sālik li Aqrab al-Masālik ilā Mażhab al-Imām Mālik (Ḥāsyiyah al-Ṣāwī ‘alā al-Syarḥ al-Ṣaghīr)*. Juz 1. Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1372 H/1952 M.

Al-Ṣaymarī, Abū ‘Abdillāh Ḥusain bin ‘Alī. *Akhbār Abī Ḥanīfah wa Aṣḥābih*. Cet. V; Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1405 H/1985 M.

Situmorang, Syafrizal Helmi, dkk. *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU Press, 2010.

Sutisna, dan Abdurrahman Misno. *Metodologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Ushul Fiqh*. Cet. I; Bogor: Uika Press, 2019.

Al-Suwaydān, Ṭāriq. *Al-Ḥanafiyyah al-Nu‘mān*. Cet. III; Kuwait: Syarikah al-Ibdā’ al-Fikr, 1433 H/2012 M.

Al-Syaibānī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin al-Ḥasan bin Farqad. *Al-Aṣl*. Cet. I; Beirut: Dār

Ibn Ḥazm, 1433 H/2012 M.

Al-Syāshī, Abū ‘Alī. *Uṣūl al-Syāshī*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1404 H/1982 M.

Al-Syāṭibī, Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī. *Al-Muwāfaqāt*. Juz 1. Cet. I; t.t.: Dār Ibn ‘Affān, 1417 H/1997 M.

Al-Tirmiżī, Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Sawrah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥḥāk. *Sunan al-Tirmiżī*. Juz 1 dan 4. Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M.

Al-Tuwayjirī, Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdillāh. *Mawsū’ah al-Fiqh al-Islāmī*. Juz 2. Cet. I; Saudi: Bayt al-Afkār al-Duwaliyyah, 1430 H/2019 M.

‘Ubaid, Hājjah Kawkab. *Fiqh al-‘Ibādāt ‘alā al-Mażhab al-Mālikī*. Cet. I; Damaskus: Maṭba’ah al-Insyā’, 1406 H/1986 M.

Untung, Slamet. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Litera, 2019.

‘Uwayḍah, Muḥammad Naṣr al-Dīn Muḥammad. *Faṣl al-Khiṭāb fī al-Zuhd wa al-Raqā’iq wa al-Ādāb*. Juz 4. t.t.: t.p., 1432 H/2011 M.

Waḥdah al-Baḥṣ al-‘Ilmī. *al-Mażāhib al-Fiqhiyyah al-Arba’ah*. Cet. I; Kuwait: Idārah al-Iftā’, 1436 H/2015 M.

Al-Wā’ilī, Muḥammad bin Ḥammūd. *Bughyah al-Muqtaṣid, Syarḥ Bidāyah al-Mujtahid li Ibn Rusyd al-Ḥafīd*. Juz 4. Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1440 H/2019 M.

Warson, Achmad. *Al-Munawwir Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.

Wizārah al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah. *Al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyah*. Kuwait: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 1404-1427 H.

Al-Żahabī, Syams al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān bin Qāymāz. *Manāqib al-Imām Abī Ḥanīfah wa Ṣāḥibayh*. Cet. III; India: Lajnah Iḥyā’ al-Ma’ārif al-Nu’māniyyah, 1408 H/1987 M.

Al-Zamakhsyarī, Jārullāh Abū al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Umar. *Al-Ru’ūs al-Masā’il: al-Masā’il al-Khilāfiyyah bayna al-Ḥanafiyyah wa al-Syāfi‘iyyah*. Cet. I; Beirut: Dār al-Basyā’ir al-Islāmiyyah li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 1407 H/1987 M.

Al-Zarkasyī, Abū ‘Abdillāh Badr al-Dīn Muḥammad bin ‘Abdillāh bin Bahādir. *Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*. Juz 2. Cet. I; Riyadh: Dār al-Kutub, 1414 H/1994 M.

Al-Ẓufairī, Maryam Muḥammad Ṣāliḥ. *Muṣṭalaḥāt al-Mażāhib al-Fiqhiyyah wa Asrār al-Fiqh al-Marmūz fī al-A‘lām wa al-Kutub wa al-Ārā’ wa al-Tarjīḥāt*. Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1422 H/2002 M.

Al-Zuḥaylī, Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mażāhib al-Arba’ah*. Juz 2. Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.

Al-Zuḥaylī, Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. II; Damaskus: Dār al-Khayr li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī’, 1427 H/2006 M.

Al-Zuḥaylī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Jurnal Ilmiah:

Muhajir. “Pendekatan Komparatif dalam Studi Islam.” *Al-Munqidz* 2, no. 2 (2013): h. 42-48.

Muqit, Abd. “Hukum dan Rukhsah Puasa dalam Perspektif Fakhrudin Al-Razi dan Musthafa Al-Maraghi: Studi Interpretasi dengan Pendekatan Tafsir Ahkam.” *Semiotika-Q* 3, no. 2 (2023): h. 324-342.

Wanji, Marnis, dkk. "Penerapan Metode Deduktif dan Induktif dalam Manajemen," Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam 3, no. 2 (2025): h. 239-250.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Afriani, Nanda. "Hukum Mengqasar Salat dalam Safar Maksiat". *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2021.

Alfi, Muhammad. "Konsep Safar dan Rukhsah dalam Perjalanan Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Azhar". *Skripsi.* Riau: Fak. Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Juliana, Rika. "Hukum Menjama' dan Mengqasar Salat (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)". *Skripsi.* Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017.

Syamsiyah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musafir yang Melakukan Hubungan Suami Istri Pada Siang Hari Bulan Ramadhan". *Skripsi.* Curup: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2020.

Zulfikar, Adryan. "Konsep Rukhsah Menurut Mazhab Syafii". *Skripsi.* Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2017.

Situs dan Sumber *Online*:

"Al-Ma'ṣiyah: Anwā'uhā wa Ṭarīq Tajannubihā". *Islam.web*, https://www.islamweb.net/ar/fatwa/35526/ (09 Juni 2026).